

ONTOLOGI ILMU PEMERINTAHAN
oleh

Fernandes Simangunsong
Institut Pemerintahan Dalam Negeri-Kementrian Dalam Negeri
Email: kisankiel@yahoo.co.id

Dikirim : 12 September 2021 **Direvisi** : 25 Oktober 2021
Diterbitkan : 25 Februari 2022

DOI : <https://doi.org/10.31943/aspirasi.v12i1.101>

ABSTRAK

Filsafat sebagai ibu dari berbagai ilmu (*mother of sciences*) mengembangkan cabang yang khusus membahas seluk beluk ilmu yang dinamakan filsafat ilmu, sehingga setiap ilmu harus memiliki filsafat ilmunya yang dibangun oleh para pencinta dan penggiat ilmu tersebut. Filsafat ilmu membahas mengenai ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi berbicara mengenai apa yang akan dikaji dari sebuah ilmu (berbicara mengenai APA). Epistemologi berbicara mengenai bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar (berbicara mengenai BAGAIMANA), sedangkan aksiologi berbicara mengenai kegunaan sebuah ilmu (berbicara mengenai NILAI KEGUNAAN). Metodologi Ilmu Pemerintahan adalah wujud dari ontologi dan epistemologi dari ilmu pemerintahan yakni metode yang membahas bagaimana memperoleh pengetahuan yang benar di bidang ilmu pemerintahan dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan adalah metode yang membahas bagaimana membangun dan memperoleh kebenaran ilmu pemerintahan secara koherensi, korespondensi dan Pragmatis. Ilmu Yang sudah memiliki denominasi ilmu yang kuat, terbentuk dari struktur berfikir dari filsafat ilmu tersebut, dimana Filsafat Ilmu akan senantiasa membangun ilmu tersebut secara “Metodologi Ilmu” dan “Metodologi Penelitian Ilmu” tersebut, jika sebuah ilmu belum terbangun metodologinya, maka denominasi filsafat ilmu tersebut masih diragukan.

Kata Kunci: Filsafat Ilmu, Ilmu Pemerintahan, Denominasi Ilmu

PENDAHULUAN

Sampai saat ini, sejarah tentang ilmu merupakan sebuah kisah kesuksesan. Kemenangan-kemenangan ilmu melambangkan suatu proses kumulatif peningkatan pengetahuan dan rangkaian kemenangan terhadap kebodohan dan takhyul. Melalui ilmulah kemudian mengalir arus penemuan-penemuan yang berguna untuk kemajuan hidup manusia. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Keraf dan Michael (2001:5) yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan didapat melalui sebuah proses, sebuah kegiatan, sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh para ilmuwan.

Fenomena yang terjadi dewasa ini yakni sejak pendidikan pra-universitas dan selama pendidikan di universitas, mahasiswa lebih banyak disodori dengan hasil ilmu pengetahuan yang sudah jadi dan siap pakai. Padahal, secara *filosofis*, sebagai calon ilmuwan mereka pun perlu menjalani kerja dan kegiatan ilmu pengetahuan itu sendiri. Mereka perlu memahami cara kerja ilmu pengetahuan dan menguasainya sebagai bagian dari pola hidupnya sebagai seorang

ilmuwan. Dengan kata lain, tujuan utama dari ilmu adalah untuk membentuk watak seorang ilmuwan, yaitu orang yang selalu penasaran ingin mengetahui lebih jauh dan lebih banyak lagi, orang yang selalu tidak puas dan selalu gelisah mempertanyakan dan mempersoalkan segala sesuatu, orang yang tidak mudah percaya kepada segala teori dan hukum ilmiah yang telah diwariskan para ilmuwan sebelumnya. Sebagai calon ilmuwan, diharapkan seluruh pembaca

diajak untuk mencari kebenarannya sendiri dan tidak harus selalu mengafirmasi kebenaran dan teori yang ditemukan oleh orang lain.

Berbicara menjadi ilmuwan termasuk pada bidang pemerintahan pasti ujung-ujungnya akan bicara tentang filsafat (*Mother Of Sciences*). Pertanyaannya, "**apa itu Filsafat?**" ini suatu pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Tetapi, kenyataan bahwa kita mengajukan pertanyaan "**apakah filsafat itu?**" sudah menunjukkan bahwa kita sedang **berfilsafat**. Dengan jawaban ini dapat dikatakan bahwa filsafat pertama-tama adalah sikap yaitu sikap mempertanyakan, sikap bertanya, yaitu bertanya dan mempertanyakan segala sesuatu, mempertanyakan apa saja. Dengan kata lain, filsafat sesungguhnya metode yaitu cara, kecenderungan, sikap bertanya tentang segala sesuatu. Sikap bertanya itu sendiri adalah filsafat, termasuk mempertanyakan "**apakah filsafat itu?**" karena, ketika kita bertanya, kita sesungguhnya berfilsafat dan dengan demikian memperlihatkan secara konkret "**hakikat filsafat**" itu sendiri. Dengan kata lain, **filsafat** adalah sebuah sistem pemikiran, atau lebih tepat cara berfikir yang terbuka yaitu terbuka untuk dipertanyakan dan terbuka untuk dipersoalkan kembali. Filsafat adalah sebuah **tanda tanya** dan bukan sebuah tanda seru, filsafat adalah "**pertanyaan dan bukan pernyataan**".

Filsafat berbeda dari "**ideologi**" dan "**dogma**" yang cenderung tertutup, menganggap kebenaran tertentu sebagai sesuatu yang tidak dapat dipersoalkan dan diterima begitu saja. Sebaliknya, filsafat dan ilmu pengetahuan pada umumnya tidak menerima kebenaran apapun sebagai sesuatu yang telah selesai. Dalam sudut pandang filsafat ilmu, hakekat sebuah ilmu dapat dilihat dari 3 (tiga) hal yakni ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu bersangkutan. Ontologi pada hakikatnya membahas tentang **apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang "ada"**. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan mengenai obyek tersebut? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita berpaling kepada epistemologi **yakni teori pengetahuan**. akhirnya dalam menjawab pertanyaan ketiga tentang nilai kegunaan atau nilai pengetahuan tersebut maka kita berpaling kepada aksiologi **yakni teori tentang nilai**.

Setiap bentuk buah pemikiran manusia dapat dikembalikan pada dasar-dasar ontologi, epistemologi dan aksiologi dari pemikiran yang bersangkutan. Analisis kefalsafahan ditinjau dari 3 (tiga) landasan ini yang akan membawa kita pada hakekat buah pemikiran tersebut, dimana "**mendalami ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu pemerintahan membuat kita tidak mudah terombang-ambing oleh perkembangan ilmu lain, serta akan menambah diskursus ilmu pemerintahan agar lebih dikenal masyarakat guna menunjukkan eksistensinya**".¹

¹ Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi Yang Diperluas) karya Sadu Wasistiono dan Fernandes Simangunsong (Februari 2015) hal 55-60

PEMBAHASAN

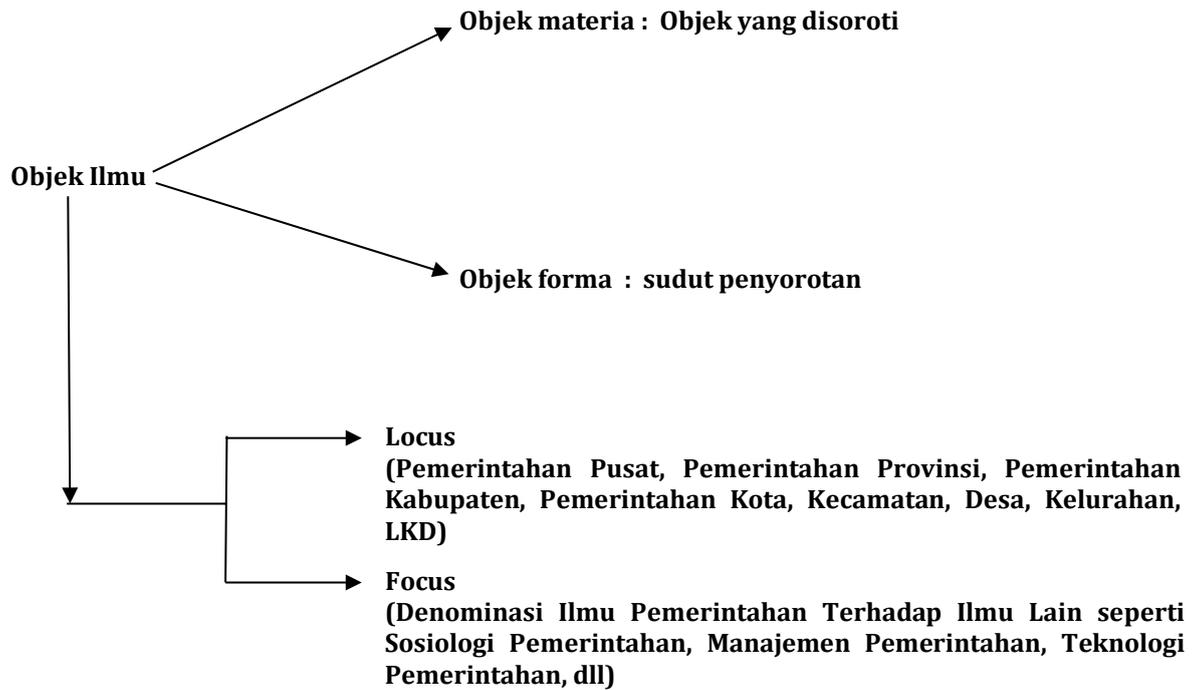
Ontologi Ilmu Pemerintahan Membangun Metodologi Ilmu Pemerintahan dan Metodologi Penelitian Pemerintahan

Memahami dan mendalami **metodologi penelitian pemerintahan** haruslah terlebih dahulu berangkat dari pemahaman seorang penggiat atau pencinta Ilmu Pemerintahan terhadap **metodologi ilmu pemerintahan**, agar seorang penggiat atau pencinta Ilmu Pemerintahan nantinya dapat menjelaskan bahwa fenomena, gejala, dan peristiwa yang dialami dan diteliti merupakan bagian dari kajian pemerintahan. **Pertanyaan besarnya adalah**

“Apakah itu Ilmu Pemerintahan?”

Menurut Wasistiono dan Simangunsong (2015:63) bahwa Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempejari hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi negara (pemerintah) dalam konteks **“kewenangan” dan “pemberian pelayanan publik”**. Jika dihubungkan dengan konsep tentang metodologi ilmu, maka pengertian-pengertian di atas merupakan bagian dari **“objek ilmu”** yaitu **objek forma** yang menjelaskan sudut penyorotan atau di dalam konsep metodologi penelitian menjadi **“kajian mendalam”** dari gejala, peristiwa, fenomena dan masalah yang terkandung dalam sebuah ilmu. Berangkat dari banyaknya pengertian-pengertian tentang ilmu pemerintahan, maka ilmu pemerintahan semakin berkembang dan dapat menyatakan eksistensi dirinya, sehingga semua penggiat, pencinta dan ilmuwan pemerintahan dapat dengan tegas menyatakan dirinya sebagai **“sosok yang cinta dan ahli di bidang ilmu pemerintahan dan TIDAK MUDAH DIGOYANG dan dianggap sebagai ahli ilmu lainnya yang serumpun dengan ilmu pemerintahan”**.

Selama ini telah terjadi fenomena **“bias sosok”** terhadap ilmu pemerintahan, dimana banyak lulusan yang menggeluti ilmu pemerintahan baik di tingkat Diploma, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 tapi masih banyak tidak memahami apa itu **“objek forma (core)”** dari ilmu pemerintahan, hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya karya ilmiah baik **“Laporan Akhir, Skripsi, Thesis dan Disertasi”** yang **tidak sesuai** dengan kajian ilmu pemerintahan dan terkesan fokus kajian ilmu pemerintahan **“sangat sedikit, sangat sempit, kurang mendalam dan kadang terkesan mengulang-ulang kajian yang ada sebelumnya”**. Selain itu yang lebih membuat miris lagi terhadap **“denominasi ilmu pemerintahan”** bahwa banyak lulusan yang menggeluti ilmu pemerintahan baik di tingkat Diploma, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 **“mau dianggap sebagai pakar ilmu serumpun”** pada ilmu sosial seperti pakar ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hubungan internasional dan ilmu lainnya yang sejenis, yang secara **objek forma (core)** ilmu berbeda. Menurut Wasistiono dan Simangunsong (2015:5) bahwa ada perbedaan antara **“objek materia”** dan **“objek forma”** dari semua rumpun ilmu sosial, hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Objek Ilmu

Merujuk kepada gambar di atas bahwa sebenarnya setiap ilmu harus memiliki objek tertentu untuk dikaji. Objek ilmu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni **objek materia** dan **objek forma**. Dimana menurut Poedjawijatna (1975:18) bahwa “**Objek materia**” adalah objek yang disoroti sebuah ilmu baik berupa gejala alam dan atau gejala sosial, sedangkan “**objek forma**” adalah sudut pandangan penyorotan terhadap sebuah ilmu. Dari konsep di atas maka Wasistiono dan Simangunsong (2015:7) menjelaskan kedudukan ilmu pemerintahan dibandingkan dengan ilmu-ilmu serumpun pada ilmu sosial, dimana melalui tabel di bawah ini dapat diketahui **sosok (core)** ilmu pemerintahan yang akan dijadikan **batu penjur** bagi semua penggiat dan pencinta ilmu pemerintahan.

Tabel 1
Perbandingan Objek Ilmu

No	Ilmu	Objek Materia	Objek Forma
1.	Ilmu Negara	Negara	Bentuk, jenis dan susunan negara
2.	Ilmu Politik	Negara	Proses Pembentukan kekuasaan
3.	Ilmu Administrasi Negara	Negara	Administrasi (artian sempit), Organisasi, Manajemen, Kepemimpinan, dan Hubungan Antara Manusia.
4.	Ilmu Tata Negara	Negara	Hubungan antar Lembaga Negara

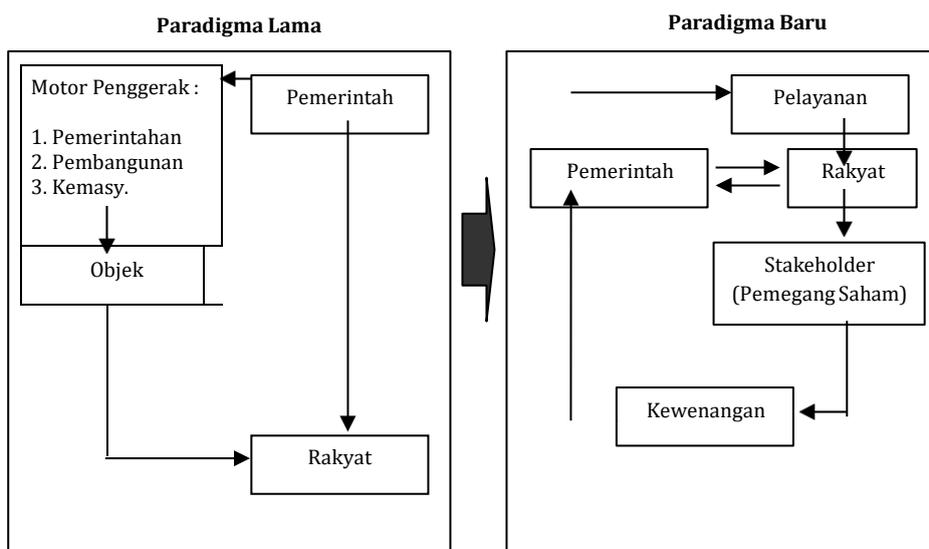
No	Ilmu	Objek Materia	Objek Forma
5.	Ilmu Hubungan Interansional	Negara	Hubungan antar Negara
6.	Ilmu Pemerintahan	Negara	Kewenangan dan pelayanan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa antara satu ilmu dengan ilmu lainnya dimungkinkan memiliki "**objek materia**" yang sama, tetapi harus memiliki "**objek forma**" yang berbeda. Ilmu yang memiliki "**objek materia**" sama dikelompokkan dalam satu rumpun, dimana satu sama lainnya saling meminjam "**teori, konsep, variabel maupun metodologi**". Ilmu atau cabang ilmu yang baru tumbuh biasanya lebih banyak meminjam teori, konsep, variabel maupun metodologi dari ilmu lain yang sudah mapan, sampai ilmu atau cabang ilmu tersebut mencapai tahap kedewasaannya, sebagai contoh ilmu akuntansi kepada ilmu ekonomi, ilmu keperawatan kepada ilmu kedokteran, begitu juga ilmu pemerintahan kepada ilmu sosial. Lahirnya ilmu-ilmu baru justru karena adanya sudut pandang yang berbeda terhadap objek yang sama. Sebagai contoh, ilmu negara, ilmu politik, ilmu administrasi negara, Ilmu Pemerintahan dan lain sebagainya memiliki "**objek materia**" yang sama yakni **negara**. Tetapi masing-masing ilmu memiliki "**objek forma**" yang berbeda. Objek forma **ilmu negara** lebih menyoroti **bentuk, jenis dan susunan negara**, objek forma **ilmu politik** lebih menyoroti **proses pembentukan kekuasaan dalam suatu negara**, Objek Forma **ilmu administrasi negara** lebih banyak menyoroti **adminsitrasi dalam arti sempit (ketatausahaan), organisasi, manajemen, kepemimpinan hingga ke tataran HR (hubungan antar manusia/human relations) dalam negara**. Sedangkan objek forma **ilmu pemerintahan** lebih menyoroti hubungan antara yang memerintah (pemerintah) dan yang diperintah (rakyat) dalam **Konteks Kewenangan dan pelayanan**.

Merujuk pendapat Wasistiono dan Simangunsong di atas bahwa dari "**objek forma**" ilmu pemerintahan yang bicara tentang "**kewenangan dan pelayanan**" akan melahirkan ilmu-ilmu baru yang dihasilkan dari kekuatan **denominasi ilmu pemerintahan** dengan ilmu lainnya, seperti contoh lahirnya ilmu sosiologi **Pemerintahan**, ilmu politik **Pemerintahan**, ilmu akuntansi **Pemerintahan**, ilmu manajemen **Pemerintahan** dan ilmu-ilmu lainnya yang menggunakan kekuatan ilmu lain dalam menyoroti gejala, peristiwa, fenomena, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan konsep **kewenangan dan pelayanan** yang menjadi "**core**" dari ilmu pemerintahan. Jika dibandingkan konsep ilmu pemerintahan yang dirumuskan oleh para ahli lainnya, terkesan ilmu pemerintahan yang ada selama ini merupakan kajian yang tidak memiliki "**denominasi (kemandirian) ilmu**", tidak memiliki **dinamika ilmu, kering dan monoton**, serta terkesan "**tidak mampu**" menjalankan fungsi ilmu yang keempat yaitu **to**

prediction (memprediksi), dan fungsi ilmu yang kelima yaitu *theory formulation* (membentuk teori).

Jika diperhatikan objek forma dari pendapat banyak ahli pemerintahan, ada beberapa pandangan yang berdekatan (hampir sama), ada juga beberapa pandangan yang masih merujuk kepada “**paradigma lama**” yang memposisikan pemerintah sebagai penguasa yang tidak berorientasi pada “**kepentingan masyarakat (pelayanan publik)**” dan ada juga yang menanamkan pola pikir pemerintahan dari berbagai aliran mengikuti “**latar belakang pendidikan**”. Sehingga dari banyak pengertian tentang pemerintahan dapat digambarkan bahwa telah terjadi “**pergeseran paradigma**” dalam memposisikan konsep ilmu pemerintahan, dimana dulu posisi pemerintah berada pada “**posisi di atas dan rakyat pada posisi di bawah**” sehingga memunculkan istilah pemerintahan berdasarkan kata (etimologis) “**perintah**” dan “**diperintah**”, adanya monopoli yang dilakukan oleh pemerintah baik pada proses “**pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan**” sehingga membuat masyarakat tidak memiliki “**daya tawar**” dalam mengajukan komplain terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh negara, apalagi memberikan “**masukan**” dalam memajukan negara.



Gambar 2. Perubahan Paradigma Pemerintahan

Sehubungan dengan berkembangnya gejala dan peristiwa pemerintahan maka menghasilkan dinamika yang baru yang menjadi “**antitesis**” dari paradigma pemerintahan yang terjadi selama ini. Posisi pemerintah yang di atas dan rakyat yang di bawah (**paradigma lama**), kini berubah sangat drastis dengan menghantarkan pola baru yang memunculkan konsep terbaru birokrasi dengan mengadopsi konsep swasta dimana birokrasi (pemerintah) kedepannya harus memposisikan masyarakat sebagai “**stakeholders**” (pemegang saham) dengan posisi yang seimbang bersama pemerintah yang mendapat mandat (kewenangan) penuh untuk memberikan

pelayanan (paradigma baru). Berangkat dari pendekatan **Metodologi Ilmu Pemerintahan** dan **Trend Pemerintahan** yang terjadi hingga saat ini, maka dapat dijelaskan

“apa itu penelitian pemerintahan?”

Penelitian pemerintahan merupakan rangkaian dalam mendalami gejala, peristiwa, fenomena, masalah dan dinamika pemerintahan melalui pendekatan penelitian. Secara metodologi sudah dapat dipahami **“inti (core)”** dari ilmu pemerintahan yaitu bicara tentang **“kewenangan dan pelayanan publik”**. Namun untuk dapat memahami konsep ilmu pemerintahan di atas dan dihubungkan dengan konsep **“Metodologi Penelitian”**, perlu dijelaskan apa itu **“konsep penelitian pemerintahan”**.

Jika dilihat dari tujuannya, menurut Wasistiono dan Simangunsong (2014:48) bahwa antara **“Metodologi Ilmu Pemerintahan”** dengan **“Metodologi Penelitian Sosial”** mempunyai kaitan yang sangat erat, dimana **Metodologi Ilmu Pemerintahan** adalah studi kritis mengenai metode dan teknik untuk memahami gejala pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mencari **pengetahuan yang benar** mengenai ilmu pemerintahan. Pada sisi lain, **Metodologi Penelitian Sosial** adalah studi kritis mengenai metode dan teknik penelitian yang dihadapkan pada masalah di bidang **“ilmu-ilmu sosial”**, dengan tujuan mencari **kebenaran ilmiah**. Dari penjelasan di atas maka secara umum, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data menggunakan metode-metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, eksperimental atau non-eksperimental, interaktif atau non-interaktif. Metode-metode tersebut telah dikembangkan secara intensif, melalui berbagai uji coba sehingga telah memiliki prosedur yang baku. Secara khusus dalam Ilmu Pemerintahan, dapat dijelaskan bahwa **“Penelitian Pemerintahan”** adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji gejala, peristiwa, fenomena dan dinamika pemerintahan guna menciptakan **kebenaran ilmu pemerintahan** dalam konteks **“KEWENANGAN DAN PELAYANAN PUBLIK”** secara **“Koherensi, Korespondensi Dan Pragmatis”** yang berangkat dari pemikiran yang sistematis dengan **“Kekuatan Teoritik, Legalistik, Empirik Dan Inovatif”**.

Jika melihat pengertian **“Penelitian Pemerintahan”** di atas maka dapat dijelaskan bahwa seorang mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan harus memahami bahwa semua penelitian pemerintahan harus memiliki unsur :

1. Penelitian pemerintahan tidak lepas dari konteks **“Kewenangan Dan Pelayanan Publik”**, dimana Kewenangan yang dikaji dan dikembangkan adalah Kewenangan Pemerintahan Pusat, Kewenangan Pemerintahan Provinsi, Kewenangan Pemerintahan Kabupaten dan Kota, Kewenangan di Level Kecamatan, Kewenangan di Level Kelurahan, Kewenangan di Level Desa dan Kewenangan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang dilihat dari **3 P + 1 D** yaitu **Kewenangan Mengelola Personil, Kewenangan Mengelola Peralatan,**

Kewenangan Mengelola Pembiayaan yang dibungkus dalam 1 Dokumentasi yang dikembangkan melalui azas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Medebewind).

Konteks Pelayanan Publik Pemerintahan akan dikembangkan hingga mencapai “**Generasi kelima**”, yang diikuti dengan perkembangan “**generasi manajemen hingga generasi kelima**”, perkembangan “**generasi organisasi hingga pada generasi kelima**” dan juga perkembangan “**generasi manajemen sumber daya aparatur yang juga sudah pada generasi kelima**”.²

2. Penelitian pemerintahan harus menampilkan kebenaran ilmu pemerintahan baik secara **Koherensi** (merujuk kepada sesuatu yang sudah dianggap benar), **Korespondensi** (merujuk kepada fakta, data dan informasi) dan **Pragmatis** (merujuk kepada kegunaan).
3. Penelitian pemerintahan memiliki 4 (empat) kekuatan berpikir yaitu kuat dalam **teoritik**, kuat dalam **legalistik**, kuat secara **empirik** dan kuat dalam **Inovatif**

Ketiga unsur di atas menjadi batu penjurur yang “**membedakan penelitian pemerintahan dengan penelitian lainnya**” dan juga dapat **membedakan** seorang mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan dengan yang lainnya. Jika melihat ketiga unsur di atas kelihatannya sangat sederhana dan tidak berbeda dengan metode penelitian ilmu lainnya, tetapi penjelasan di atas akan menjadi bahan dasar untuk menjelaskan “**kekuatan dari ilmu pemerintahan**”, terkhusus untuk kekuatan berpikir Ilmu Pemerintahan secara legalistik, karena “**kekuatan berpikir legalistik**” inilah yang menjadi **unsur pembeda** antara penelitian pemerintahan dengan penelitian lainnya, sehingga dapat di jelaskan bahwa “**tidak semua masalah-masalah pemerintahan dapat dijawab dengan metode penelitian sosial, namun harus dijawab dengan metode penelitian pemerintahan**”. Artinya selama ini dalam memecahkan setiap **masalah pemerintahan** hanyalah dengan **metode penelitian sosial** yang senantiasa menekankan kepada “**kekuatan berpikir teoritik**” dalam membelah sebuah masalah (pisau analisis).

Mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan dalam melakukan penelitian pemerintahan tanpa menggunakan “**kekuatan berpikir legalistik**” ibarat “**sayur tanpa garam**” karena apapun implementasi dari praktek-praktek pemerintahan senantiasa tidak pernah lepas dengan “**peraturan perundang-undangan**” yang merupakan alat kekuatan berpikir legalistik. Jika mendiskusikan sebuah fakta, fenomena atau dinamika pemerintahan **tanpa kekuatan berpikir legalistik akan menghasilkan sebuah kajian pemerintahan yang ompong dan tidak implementatif**. Namun “**kekuatan berpikir legalistik**” bukanlah menjadi “**dominan**” dalam setiap “**penulisan tugas akhir**” baik laporan akhir, skripsi, tesis dan disertasi karena

² Reformasi Birokrasi Indonesia Menuju Pemerintahan Kelas Dunia (Orasi Ilmiah Guru Besar) karya Fernandes Simangunsong (Oktober 2018) hal 1-52

seorang mahasiswa, peneliti, dan penggiat ilmu pemerintahan haruslah bebas nilai dan *“out of box”* dalam melihat tradisi-tradisi pemerintahan yang terbentuk secara legalistik.³

Penutup

Kehidupan ilmu pemerintahan bagaikan kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Mengapa?

1. Ilmu pemerintahan kekurangan **“konsep dan teori”** sebagai alat analisis, sehingga kurang menjelaskan gejala dan peristiwa aktual pemerintahan. Dalam pengembangan ilmu pemerintahan, beberapa ahli menentang penelitian pemerintahan dengan menggunakan pendekatan **“studi kemungkinan”**, namun jika melihat fungsi ilmu yang keempat, perlu kiranya sebuah ilmu memiliki **“fungsi prediksi (prediction)”**, agar ilmu tersebut dapat memberikan nilai guna dan menjadi lebih fungsional
2. Ilmu pemerintahan kekurangan pendukung dan peminat yang memiliki kepedulian untuk mengembangkan **“ilmu dan kemahiran”** pemerintahan, sebab sebagian besar pendukungnya berada di lingkungan birokrasi yang terbelenggu oleh kultur yang tidak dinamis.
3. Praktisi-praktisi Ilmu pemerintahan khususnya birokrasi sebagai pengguna ilmu pemerintahan **“tidak memiliki tradisi menulis”**, sehingga berbagai fakta empirik menjadi tidak bermakna. Berbeda dengan **“praktisi manajemen bisnis”** yang banyak menjadi penulis buku berbobot dengan mengemas pengalamannya dalam karya ilmiah.
4. Banyak ilmuwan lain, terutama dari ilmu politik yang masih meragukan **“eksistensi ilmu pemerintahan”**. Mereka masih menganggap **Ilmu Pemerintahan** hanya sekedar **cabang dari ilmu politik** dan **Ilmu Administrasi Negara** menganggap **Ilmu Pemerintahan** sebagai saudara kembar yang sejalan dalam perlombaan mengembangkan pengaruh antara **“Aliran eropah kontinental”** dan **“Aliran Anglosaxon”**.
5. Ahli-ahli di bidang ilmu pemerintahan kurang mendapat **“penghargaan dalam pengembangan kariernya”**. Banyak jabatan di pemerintahan yang memerlukan keahlian ilmu pemerintahan saat ini diisi oleh berbagai disiplin ilmu lainnya, tanpa memperhatikan **“kompetensinya”**.

Bagaimana cara mengembangkannya?

1. Memfasilitasi pembentukan **“asosiasi yang bergerak di bidang ilmu dan kemahiran”** pemerintahan yang berwibawa.
2. Menerbitkan **“jurnal ilmiah”** secara periodik.
3. Memfasilitas **“penelitian bidang pemerintahan”**, sehingga tercipta berbagai teori baru. Melalui alat analisis yang baru, ilmu pemerintahan harus mampu menggambarkan, menjelaskan, memverifikasi serta memprediksi gejala dan peristiwa pemerintahan masa kini,

³ Metodologi Penelitian Pemerintahan (Teoritik, Legalistik, Empirik dan Inovatif) karya Fernandes Simangunsong (Mey 2016) hal 1-32

saat ini dan masa yang akan datang, sehingga keberadaannya makin fungsional bagi masyarakat umumnya, dan komunitas pemerintahan khususnya.

4. Mengadakan "**seminar**" secara berkala dan merata.
5. Memberikan "**bantuan biaya**" bagi pengembangan ilmu pemerintahan kepada birokrat maupun ilmuwan yang memiliki talenta dan perhatian pada ilmu pemerintahan.⁴

Saran Akademis

Terakhir, kecintaan terhadap ilmu pemerintahan merupakan sebuah perjalanan panjang dalam berpikir yang diibaratkan seorang laki-laki yang sedang mendekati seorang wanita, dimana terjadi "**proses hati dan rasa**" yang diawali dengan rasa **senang, suka, simpati, sayang, dan cinta** terhadap ilmu pemerintahan. Proses hati di atas dapat kita analogikan dengan jenjang pendidikan seseorang dalam mencintai sebuah ilmu yang diibaratkan mencintai seseorang. Perasaan "**senang**" seseorang terhadap ilmu (pemerintahan) dapat diukur pada tingkat Diploma III (D-3) dan Diploma IV (D-4), jika perasaan itu berlanjut kejenjang "**suka**", maka seseorang akan melanjutkan pendidikannya kejenjang Strata Satu (S1) pada ilmu yang sama, dan jika perasaan itu semakin tumbuh menjadi "**simpati**", maka seseorang juga akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang Strata Dua (S2) pada ilmu yang sama, serta dipuncak perasaan seseorang terhadap sebuah ilmu dan menyakini bahwa "**ilmu itu akan menjadi pegangan hidupnya serta yakin bahwa seseorang dapat hidup dari ilmu tersebut**" maka dipastikan perasaan seseorang tersebut akan masuk kejenjang "**sayang**" apabila sudah memutuskan diri masuk ke jenjang pendidikan Strata Tiga (S3) pada ilmu yang sama.

Pertanyaannya "**Bagaimanakah ukuran jenjang perasaan CINTA seseorang terhadap ilmu?**" Perasaan cinta itu dapat terjawab apabila seseorang yang cinta ilmu sudah menjadi ilmuwan yang paripurna (**hingga menjadi Guru Besar**) yang "**terus mengabdikan, berbagi dan melakukan kaderisasi**" terhadap ilmu tersebut. Namun kelima rasa tersebut terkadang dipenuhi dengan rasa "**cemburu**" agar kita semakin kuat untuk tetap mencintai ilmu kita dengan melihat hubungan cinta dari ilmu lain sehingga menguatkan diri untuk menghadirkan banyak karya tentang pemerintahan baik dalam bentuk "**buku dan juga jurnal**". Kekuatan cinta seseorang dapat teruji pada saat seseorang cemburu terhadap yang dicintai, begitu juga dengan para pakar ilmu pemerintahan yang juga "**merasa cemburu**" terhadap ilmu-ilmu lain, dimana ilmu-ilmu tersebut telah "**berevolusi dengan sempurna**" baik secara "**Metodologi Ilmu**" maupun "**Metodologi Penelitian**" dan melahirkan "**Ilmu-Ilmu Cangkakan Yang Baru**" yang merupakan **Gabungan dari Denominasi Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Lainnya**.

⁴ Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi Yang Diperluas) karya Sadu Wasistiono dan Fernandes Simangunsong (Februari 2015) hal 71-73

Selain itu, Besarnya gelombang perubahan yang terjadi saat ini, seharusnya juga diikuti oleh **pengembangan pendidikan** yang ada di Indonesia dengan dimulai merubah **paradigma** penulisan **“TUGAS AKHIR”** baik **Laporan Akhir, Skripsi, Thesis, dan Disertasi** para peserta didik yang ada di Indonesia termasuk pada pengembangan **Ilmu Pemerintahan**, yang mana selama ini **“statement” di cover depan** Laporan Akhir, Skripsi, Thesis, dan Disertasi semua mahasiswa Indonesia **hanyalah sekedar untuk mendapatkan GELAR saja**, namun sebaiknya dalam menghadapi **dinamika pemerintahan** menuju **pemerintahan kelas dunia** atau **“World Class Government”**, sudah saatnya **produk pendidikan di Indonesia** termasuk **Pendidikan Ilmu Pemerintahan** harus mulai untuk mau merubah **kalimat “statement” di cover depan tersebut** dengan menyebutkan bahwa tugas akhir yang disusun mahasiswa sebagai syarat kelulusan baik itu **laporan akhir, skripsi, thesis, dan disertasi** yang ditulis oleh mahasiswa adalah **“untuk memenuhi KOMPETENSI pada gelar akademik.....(sarjana, magister, dan doktor).....”** artinya hasil **tugas akhir** baik itu **laporan akhir, skripsi, thesis, dan disertasi** akan menunjukkan **keahlian seseorang** atau **gambaran kompetensi** yang terus dikembangkan guna menghadapi **“Agile Governance”** yang merupakan bagian dari pengembangan Ilmu Pemerintahan di masa yang akan datang.⁵

Saran Praktis

Secara Pragmatis, kita harus yakin bahwa **“kita bisa hidup dengan Ilmu Pemerintahan”**, seperti Dokter hidup dengan Ilmu Kedokterannya, Insinyur hidup dengan Ilmu Tekniknya. Ada 516 Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia, dan ada 34 Provinsi yang harus kita layani sebagai pakar pemerintahan. Jika 1 (satu) tahun itu 365 hari, dan kita diminta menjadi konsultan pemerintahan yang **“kuat secara teoritik, legalistik, empirik dan inovatif”**, pertanyaannya, **Apakah 516 Kabupaten/Kota dan 34 provinsi itu sanggup dan habis kita layani semua dalam satu tahun? Bagaimana pula kalau kita pakar pemerintahan diminta menjadi tenaga ahli atau konsultan untuk membantu permasalahan di Pemerintahan Pusat? Akademisi Ilmu Pemerintahan harus mulai paham dan meresapi secara mendalam apa itu Filosofi “Point” dan “Koin”?** atau di satu sisi kita diminta menjadi tenaga ahli atau konsultan untuk **kurang lebih 8.000 Kecamatan dan kurang lebih 79.000 Desa?** semoga ini menjadi perenungan dan batu penjuruk bagi kawan-kawan agar mulai **“on the track”** untuk **tetap setia dan selalu setia** dalam mendalami **jati diri Ilmu Pemerintahan** sebagai bentuk **Penyataan tegas** kita dalam **“menegakkan Ontologi Ilmu Pemerintahan”**.⁶

⁵ Reformasi Birokrasi Indonesia Menuju Pemerintahan Kelas Dunia (Orasi Ilmiah Guru Besar) karya Fernandes Simangunsong (Oktober 2018) hal 84-85

⁶ Metodologi Penelitian Pemerintahan (Teoritik, Legalistik, Empirik dan Inovatif) karya Fernandes Simangunsong (Mey 2016) hal 2-3

Referensi

Keraf, AS dan Dua Mikhael, 2001, Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis), Kanisius, Yogyakarta

Poedjawijatna, 1975, Filsafat, Yayasan Kanisius, Yogyakarta

Simangunsong, Fernandes, 2016, Metodologi Penelitian Pemerintahan (Teoritik, Legalistik, Empirik dan Inovatif), PT. Alfabeta, Bandung

Simangunsong, Fernandes, 2018, Reformasi Birokrasi Indonesia Menuju Pemerintahan Kelas Dunia, PT. Cita Intrans Selaras, Malang

Wasistiono, Sadu dan Fernandes Simangunsong, 2015, Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi Yang Diperluas), IPDN Press, Sumedang